



Mediation of Power in Political Communication in the Era of Information Globalization (Case Study of the Golkar Party)

Mediasi Kekuasaan dalam Komunikasi Politik di Era Globalisasi Informasi (Studi Kasus Partai Golkar)

Achmad Muchlis^{1*}; Andi Faisal Bakti²

¹Doctoral Program in Communication Science, Graduate School of Sahid University Jakarta;

²Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

*¹Author Correspondence Email: muchlis172@gmail.com

Article History	Received (January 2 nd , 2026)	Revised (February 5 th , 2026)	Accepted (March 7 th , 2026)
-----------------	--	--	--

News Article

Keyword:

*Digital Public Sphere;
Golkar Party;
Information Globalization;
Mediated Power;
Political Communication.*

Abstract

Information globalization has fundamentally transformed the structure and practice of political communication in contemporary democracies. Rapid, cross-border digital information flows mediated by global media platforms have weakened the capacity of states and political parties to control public narratives. Political communication no longer operates within centralized and hierarchical spaces, but rather within fragmented and competitive digital public spheres. This study aims to analyze how the Golkar Party, as an established political party, conducts political communication in the context of information globalization and the weakening role of the state. This research employs a qualitative approach within a constructivist paradigm using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with local Golkar Party elites and document analysis, and analyzed using critical discourse analysis. The findings indicate that Golkar's political communication functions as a process of mediated meaning negotiation within digital media environments. Political power is no longer derived solely from formal institutional structures, but increasingly depends on media visibility and public trust. The Golkar Party adopts a hybrid political communication strategy by combining organizational structures with adaptive digital communication practices. This study concludes that political communication of established parties in the era of information globalization should be understood as a dynamic and relational arena of mediated power, where political legitimacy is continuously negotiated within digital public spaces.

Kata Kunci:

**Globalisasi Informasi;
Komunikasi Politik;
Mediasi Kekuasaan;
Partai Golkar;**

Abstrak

Globalisasi informasi telah mengubah secara fundamental struktur dan praktik komunikasi politik dalam demokrasi kontemporer. Arus informasi digital yang cepat, lintas batas, dan dimediasi oleh platform media global menyebabkan melemahnya kemampuan negara dan partai politik dalam mengendalikan narasi publik. Komunikasi politik tidak lagi berlangsung dalam ruang yang terpusat dan hierarkis, melainkan dalam ruang publik digital yang terfragmentasi dan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Partai Golkar

Ruang Publik
Digital.

sebagai partai politik mapan menjalankan komunikasi politiknya dalam konteks globalisasi informasi dan pelemahan peran negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan elite Partai Golkar di tingkat lokal serta analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik Partai Golkar berlangsung sebagai proses negosiasi makna yang termediasi oleh media digital. Kekuasaan politik tidak lagi sepenuhnya bersumber dari struktur institusional formal, melainkan bergantung pada visibilitas media dan kepercayaan publik. Partai Golkar mengembangkan strategi komunikasi politik hibrida dengan mengombinasikan kekuatan struktur organisasi dan adaptasi terhadap logika komunikasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik partai mapan di era globalisasi informasi harus dipahami sebagai arena mediasi kekuasaan yang bersifat relasional dan dinamis, di mana legitimasi politik terus dinegosiasikan dalam ruang publik digital.

To cite this article: Achmad Muchlis dan Andi Faisal Bakti. (2026). "Mediation of Power in Political Communication in the Era of Information Globalization (Case Study of the Golkar Party)". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(3), January-April, 2026. Page: 2163 – 2178.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Globalisasi informasi telah membawa perubahan struktural yang mendalam dalam sistem komunikasi politik kontemporer. Perkembangan teknologi digital, platform media sosial global, serta percepatan arus informasi lintas batas telah menggeser cara aktor politik memproduksi, menyebarkan, dan mengelola pesan politik. Komunikasi politik yang sebelumnya banyak berlangsung dalam ruang yang terpusat dan relatif dapat dikendalikan oleh negara maupun partai politik, kini bergerak ke arah ruang publik digital yang terbuka, terfragmentasi, dan kompetitif (Castells, 2011; Davis, 2010).

Perubahan ini berdampak langsung pada relasi antara negara, partai politik, media, dan publik. Media digital memungkinkan publik tidak lagi berperan sebagai penerima pasif pesan politik, melainkan sebagai aktor aktif yang memproduksi, menafsirkan, dan menyebarkan informasi politik. Akibatnya, komunikasi politik tidak lagi berjalan secara linier dari aktor politik kepada publik, tetapi berlangsung dalam arus interaksi yang dinamis dan sulit dikendalikan secara institusional (Chadwick, 2017). Kondisi ini menjadikan ruang publik digital sebagai arena utama pembentukan opini publik sekaligus negosiasi legitimasi politik.

Dalam demokrasi kontemporer, fragmentasi ruang publik digital menjadi ciri utama komunikasi politik. Audiens tidak lagi terkonsentrasi pada satu kanal informasi, melainkan tersebar dalam berbagai platform dengan logika algoritmik yang berbeda-beda. Fragmentasi ini tidak hanya memengaruhi distribusi informasi, tetapi juga cara publik memahami, menilai, dan merespons pesan politik. Bennett dan Pfetsch (2018) menunjukkan bahwa dalam situasi tersebut, partai politik kehilangan posisi dominannya sebagai penentu agenda publik dan harus bersaing dengan berbagai aktor non-negara dalam ruang komunikasi yang terdisrupsi.

Perubahan lanskap komunikasi politik tersebut juga menandai pergeseran sumber kekuasaan politik. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya bersumber dari posisi formal dalam struktur negara atau partai politik, melainkan semakin bergantung pada visibilitas

media dan kemampuan aktor politik membangun kepercayaan publik. Aeron Davis menegaskan bahwa dalam sistem komunikasi yang semakin termediasi, kekuasaan politik diproduksi dan dipertahankan melalui proses representasi, framing, dan persepsi publik yang dimediasi oleh media (Davis, 2018; Davis, 2020). Media dalam hal ini tidak sekadar menjadi saluran komunikasi, tetapi mediator utama relasi kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, negara mengalami apa yang disebut sebagai *weakening of the state*, yakni berkurangnya kapasitas negara untuk mengendalikan arus informasi publik secara sepihak. Castells (2009) menunjukkan bahwa globalisasi informasi dan logika jaringan telah membatasi kemampuan negara dalam mengatur komunikasi politik secara hierarkis. Pelemahan ini tidak berarti negara kehilangan peran, melainkan perubahan posisi negara dari pengendali informasi menjadi salah satu aktor dalam arena komunikasi yang terbuka dan kompetitif (Davis, 2010).

Di Indonesia, transformasi komunikasi politik berlangsung dalam konteks negara pasca-otoritarian yang masih ditandai oleh warisan relasi kuat antara negara, birokrasi, dan partai politik mapan. Partai Golkar merupakan contoh penting partai politik dengan sejarah panjang keterkaitan dengan negara sejak masa Orde Baru. Pada periode tersebut, komunikasi politik Golkar berlangsung dalam sistem yang relatif stabil, terpusat, dan dikendalikan oleh negara, sehingga legitimasi politik lebih banyak bersumber dari struktur institusional formal (Mietzner, 2013).

Namun, era reformasi dan globalisasi informasi telah mengubah secara signifikan lanskap komunikasi politik tersebut. Fragmentasi ruang publik digital menyebabkan pesan politik Partai Golkar tidak lagi diterima secara seragam, melainkan ditafsirkan secara beragam oleh publik sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan preferensi media masing-masing. Hidayat dan Ishak (2019) menunjukkan bahwa media digital telah mengubah pola komunikasi partai politik di Indonesia menjadi lebih dialogis, namun sekaligus rentan terhadap fragmentasi makna dan polarisasi wacana.

Sejumlah penelitian internasional juga memperkuat gambaran perubahan tersebut. Chadwick (2017) melalui konsep *hybrid media system* menunjukkan bahwa komunikasi politik kontemporer berlangsung dalam sistem media yang mengombinasikan media lama dan media baru, sehingga aktor politik dituntut untuk menegosiasikan pesan politiknya di berbagai platform sekaligus. Couldry dan Hepp (2017) menegaskan bahwa dalam kondisi *deep mediatization*, praktik politik tidak dapat dilepaskan dari logika media, karena media telah terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami transformasi komunikasi politik di era digital, sebagian besar kajian masih berfokus pada konteks nasional atau sistem media secara umum. Relatif sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana globalisasi informasi dan mediasi kekuasaan beroperasi dalam praktik komunikasi politik partai politik mapan di tingkat lokal. Padahal, tingkat lokal merupakan arena penting di mana dinamika globalisasi informasi berinteraksi langsung dengan realitas sosial dan politik yang kontekstual.

Dalam konteks tersebut, komunikasi politik tidak lagi dapat dipahami sebagai instrumen teknis penyampaian pesan atau alat pengendalian narasi publik semata. Komunikasi politik harus dipahami sebagai proses negosiasi makna yang berlangsung dalam ruang publik digital yang termediasi, di mana kekuasaan dan legitimasi politik terus diproduksi dan dinegosiasikan melalui interaksi antara aktor politik, media, dan publik (Davis, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji praktik komunikasi politik Partai Golkar dalam konteks globalisasi informasi melalui perspektif mediasi kekuasaan. Fokus pada tingkat lokal dipilih untuk menangkap secara lebih

mendalam bagaimana perubahan struktural dalam sistem komunikasi global beroperasi dalam praktik komunikasi politik sehari-hari partai politik mapan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam memahami transformasi komunikasi politik, legitimasi, dan kekuasaan partai politik mapan di era globalisasi informasi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadinya fragmentasi ruang publik digital yang mengubah pola komunikasi politik partai politik mapan.
2. Melemahnya kemampuan negara dan partai politik dalam mengendalikan narasi publik di era globalisasi informasi.
3. Perubahan sumber legitimasi politik dari struktur institusional menuju kepercayaan dan visibilitas media.
4. Tantangan adaptasi komunikasi politik Partai Golkar dalam ruang publik digital yang kompetitif.
5. Kebutuhan pendekatan teoretis yang mampu menjelaskan relasi antara komunikasi, kekuasaan, dan globalisasi informasi.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik komunikasi politik Partai Golkar berlangsung dalam konteks globalisasi informasi?
2. Sejauh mana globalisasi informasi memengaruhi strategi komunikasi politik Partai Golkar di tingkat lokal?
3. Bagaimana konsep mediasi kekuasaan menjelaskan relasi antara komunikasi politik, legitimasi, dan kekuasaan Partai Golkar?
4. Mengapa pelemahan peran negara relevan untuk memahami transformasi komunikasi politik partai mapan di era digital?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik komunikasi politik Partai Golkar dalam konteks globalisasi informasi.
2. Menjelaskan perubahan relasi kekuasaan dan legitimasi politik dalam komunikasi politik partai mapan.
3. Mengkaji relevansi konsep mediasi kekuasaan dan pelemahan peran negara dalam memahami komunikasi politik kontemporer.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis: memperkaya kajian komunikasi politik dengan pendekatan mediasi kekuasaan dalam konteks globalisasi informasi.
2. Manfaat Akademik: menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai komunikasi politik partai politik mapan di era digital.
3. Manfaat Praktis: memberikan pemahaman bagi partai politik dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya adaptasi komunikasi politik yang berbasis kepercayaan publik.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis penelitian ini berangkat dari kajian komunikasi politik kritis dalam konteks globalisasi informasi. Globalisasi informasi dipahami sebagai proses struktural yang ditandai oleh percepatan arus informasi lintas batas, berkembangnya media digital global, serta melemahnya kontrol negara dan institusi politik formal terhadap sirkulasi pesan publik. Kondisi ini mengubah secara mendasar cara komunikasi politik diproduksi, disebarkan, dan dimaknai dalam demokrasi kontemporer.

Dalam konteks tersebut, komunikasi politik tidak lagi berlangsung dalam ruang yang terpusat dan hierarkis, melainkan dalam ruang publik digital yang terfragmentasi dan kompetitif. Ruang publik digital memungkinkan munculnya beragam aktor non-negara yang berperan aktif dalam produksi dan distribusi makna politik. Akibatnya, pesan politik tidak lagi diterima secara seragam, tetapi ditafsirkan secara beragam sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan logika algoritmik media. Komunikasi politik dengan demikian menjadi arena negosiasi makna yang terus-menerus berlangsung.

Penelitian ini merujuk pada pemikiran Aeron Davis mengenai globalisasi komunikasi dan konsep *mediasi kekuasaan* (*mediated power*) sebagai kerangka analisis utama. Davis menegaskan bahwa dalam sistem komunikasi yang semakin termediasi oleh media, kekuasaan politik tidak lagi semata-mata bersumber dari posisi formal dalam struktur negara atau partai politik. Kekuasaan justru diproduksi dan dipertahankan melalui proses representasi, framing, visibilitas media, dan persepsi publik. Media dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai mediator yang membentuk relasi kekuasaan antara aktor politik dan publik.

Sejalan dengan itu, konsep pelemahan peran negara (*weakening of the state*) digunakan untuk menjelaskan perubahan posisi negara dan partai politik dalam pengelolaan informasi publik. Pelemahan ini tidak dimaknai sebagai hilangnya peran negara, melainkan sebagai berkurangnya kapasitas negara dan partai politik untuk mengendalikan arus informasi secara sepihak. Legitimasi politik tidak lagi dapat diproduksi melalui otoritas institusional semata, tetapi semakin bergantung pada kemampuan aktor politik membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui komunikasi yang transparan dan konsisten di ruang publik digital.

Dalam konteks tersebut, konsep mediasi kekuasaan menjadi relevan untuk membaca praktik komunikasi politik partai politik mapan, khususnya Partai Golkar, yang memiliki sejarah panjang keterkaitan dengan negara dan struktur birokrasi. Sebagai partai yang sebelumnya beroperasi dalam sistem komunikasi politik yang relatif stabil dan terkontrol, Partai Golkar kini dihadapkan pada tuntutan adaptasi terhadap logika komunikasi digital yang cair dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Komunikasi

politik Partai Golkar dengan demikian dipahami sebagai praktik adaptif dalam arena kekuasaan yang bersifat relasional, di mana legitimasi politik terus dinegosiasikan melalui media dan interaksi dengan publik.

Dengan menggunakan kerangka teoretis ini, penelitian memosisikan komunikasi politik bukan sebagai instrumen teknis penyampaian pesan, melainkan sebagai mekanisme utama dalam produksi dan transformasi kekuasaan politik di era globalisasi informasi. Kerangka ini menjadi dasar analitis untuk memahami bagaimana Partai Golkar membangun, mempertahankan, dan menegosiasikan legitimasi politiknya dalam ruang publik digital yang semakin terfragmentasi.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara globalisasi informasi, komunikasi politik, dan mediasi kekuasaan dalam praktik komunikasi politik Partai Golkar di tingkat lokal. Globalisasi informasi diposisikan sebagai konteks struktural yang membentuk perubahan lingkungan komunikasi politik melalui percepatan arus informasi digital, keterbukaan ruang publik, serta meningkatnya peran media digital global.

Dalam konteks tersebut, globalisasi informasi memicu terjadinya fragmentasi ruang publik digital, di mana produksi dan sirkulasi informasi politik tidak lagi terpusat pada negara atau partai politik. Fragmentasi ini menyebabkan komunikasi politik berlangsung dalam ruang yang kompetitif dan dinamis, dengan keterlibatan berbagai aktor non-negara serta logika media yang berbasis visibilitas dan atensi publik.

Fragmentasi ruang publik digital tersebut kemudian memengaruhi praktik komunikasi politik Partai Golkar. Komunikasi politik tidak hanya dipahami sebagai penyampaian pesan institusional, tetapi sebagai proses interaksi dan negosiasi makna yang termediasi oleh media digital. Dalam proses ini, media berperan sebagai mediator utama yang membentuk cara pesan politik diproduksi, ditampilkan, dan ditafsirkan oleh publik.

Mediasi media digital selanjutnya menghasilkan proses mediasi kekuasaan, yaitu mekanisme di mana kekuasaan dan legitimasi politik diproduksi melalui representasi, framing, dan persepsi publik. Kekuasaan politik tidak lagi sepenuhnya bersumber dari struktur formal partai atau negara, melainkan dari visibilitas media dan tingkat kepercayaan publik yang berhasil dibangun melalui komunikasi politik.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Partai Golkar mengembangkan strategi komunikasi politik hibrida, yakni pengombinasian antara kekuatan struktur organisasi partai yang bersifat institusional dengan adaptasi terhadap logika komunikasi digital yang fleksibel dan interaktif. Strategi ini memungkinkan Partai Golkar mempertahankan identitas institusional sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika ruang publik digital. Pada akhirnya, legitimasi politik dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi yang terus dinegosiasikan dalam ruang publik digital yang termediasi.



↓
Strategi Komunikasi Politik Hibrida

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik komunikasi politik dan proses pembentukan makna dalam konteks sosial yang spesifik, bukan untuk menguji hubungan kausal atau melakukan generalisasi statistik (Creswell & Poth, 2018). Paradigma konstruktivis memandang realitas sosial dan politik sebagai hasil konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi sosial, bahasa, dan praktik komunikasi (Denzin & Lincoln, 2018).

Dalam kerangka ini, komunikasi politik tidak dipahami sebagai proses netral atau teknis semata, melainkan sebagai arena produksi makna dan relasi kekuasaan yang bersifat dinamis dan kontekstual. Paradigma konstruktivis relevan untuk menganalisis komunikasi politik di era globalisasi informasi, di mana makna politik terus dinegosiasikan dalam ruang publik digital yang termediasi oleh media (Davis, 2018).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena komunikasi politik dalam konteks nyata yang kompleks dan terikat pada kondisi sosial tertentu (Yin, 2018). Fokus studi kasus diarahkan pada praktik komunikasi politik Partai Golkar di tingkat lokal sebagai representasi partai politik mapan yang beroperasi dalam dinamika globalisasi informasi.

Pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menangkap relasi antara struktur organisasi partai, praktik komunikasi politik, dan dinamika ruang publik digital secara holistik dan kontekstual (Stake, 1995).

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah elite Partai Golkar di tingkat lokal yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi politik. Pemilihan elite partai didasarkan pada peran strategis mereka dalam menentukan arah komunikasi, framing isu, serta relasi simbolik dengan publik.

Objek penelitian ini adalah praktik komunikasi politik Partai Golkar dalam konteks globalisasi informasi, yang mencakup narasi politik, strategi komunikasi, penggunaan media digital, serta proses negosiasi legitimasi politik dalam ruang publik digital yang termediasi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan elite Partai Golkar di tingkat lokal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang

bagi informan dalam mengemukakan pandangan dan pengalaman mereka secara reflektif, sekaligus menjaga fokus pada tujuan penelitian (Kvale & Brinkmann, 2015).

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, meliputi dokumen resmi partai, pernyataan publik, materi komunikasi politik, serta literatur ilmiah yang relevan. Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman konteks dan memungkinkan triangulasi informasi (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis wacana kritis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa, simbol, dan narasi politik digunakan dalam membangun makna serta relasi kekuasaan dalam komunikasi politik (Fairclough, 2013). Analisis wacana kritis relevan untuk penelitian ini karena menempatkan komunikasi sebagai praktik sosial yang tidak terlepas dari konteks kekuasaan dan ideologi.

Proses analisis data meliputi pengodean tematik, identifikasi pola wacana, serta interpretasi temuan dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis, khususnya konsep globalisasi komunikasi, mediasi kekuasaan, dan pelemahan peran negara sebagaimana dikemukakan oleh Davis (2018, 2020). Analisis dilakukan secara iteratif untuk memastikan keterkaitan yang konsisten antara data empiris dan kerangka konseptual penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data hasil wawancara dan analisis dokumen (Denzin, 2012). Selain itu, peneliti menerapkan reflektivitas dalam proses analisis untuk menyadari posisi peneliti dan potensi bias interpretatif. Konsistensi antara temuan empiris, kerangka teoretis, dan kerangka konseptual dijadikan dasar utama validitas analisis.

Pertimbangan etis dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan sebelum wawancara, serta menggunakan data semata-mata untuk kepentingan akademik sesuai prinsip etika penelitian sosial (Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi Informasi dan Perubahan Pola Komunikasi Politik Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi politik Partai Golkar di tingkat lokal. Arus informasi digital yang cepat dan lintas batas menyebabkan komunikasi politik tidak lagi berlangsung dalam pola linier dan terpusat, melainkan dalam ruang publik digital yang terbuka dan kompetitif. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Castells (2011) dan Davis (2018) yang menegaskan bahwa globalisasi komunikasi menggeser praktik politik ke dalam sistem jaringan yang terfragmentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, ditemukan bahwa masyarakat lokal mengalami perubahan signifikan dalam cara mengakses dan menilai informasi politik. Masyarakat tidak lagi bergantung pada informasi resmi dari pemerintah daerah atau struktur partai, tetapi secara aktif mengakses berbagai sumber informasi digital dan membandingkannya sebelum membentuk sikap politik. Hal ini

menunjukkan bahwa publik berperan aktif sebagai subjek komunikasi politik, bukan sekadar penerima pesan (Wawancara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, 2025).

Temuan ini mengonfirmasi argumen Chadwick (2017) mengenai *hybrid media system*, di mana komunikasi politik berlangsung melalui interaksi antara media lama dan media baru serta melibatkan berbagai aktor di luar institusi politik formal. Dalam konteks ini, pesan politik partai tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh struktur organisasi, tetapi harus bernegosiasi dengan dinamika wacana yang berkembang di ruang digital.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa arus informasi global memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan partai politik di tingkat lokal. Informasi mengenai kebijakan daerah lain maupun praktik pemerintahan di tingkat nasional dan internasional menjadi referensi pembandingan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Akibatnya, ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan partai politik meningkat, terutama dalam hal kecepatan respons, transparansi, dan konsistensi komunikasi politik (Wawancara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, 2025).

Kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut Bennett dan Pfetsch (2018) sebagai *disrupted public sphere*, di mana ruang publik tidak lagi terintegrasi secara utuh, tetapi terpecah ke dalam berbagai arena komunikasi dengan logika dan audiens yang berbeda. Dalam ruang publik yang terfragmentasi ini, komunikasi politik berfungsi sebagai arena negosiasi makna yang terus berlangsung, bukan sebagai sarana transmisi pesan satu arah.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan adanya kesadaran dari elite Partai Golkar terhadap keterbatasan negara dan partai politik dalam mengendalikan arus informasi publik. Peran pemerintah daerah dalam komunikasi politik tidak lagi dipahami sebagai pengendali informasi, melainkan sebagai pengelola legitimasi yang harus dibangun melalui komunikasi yang persuasif dan berbasis kepercayaan publik. Temuan ini sejalan dengan konsep *weakening of the state* yang dikemukakan oleh Davis (2010), di mana otoritas institusional formal tidak lagi cukup untuk menjamin pengaruh politik.

Dengan demikian, globalisasi informasi telah mendorong perubahan pola komunikasi politik Partai Golkar di tingkat lokal dari komunikasi yang bersifat struktural dan hierarkis menuju komunikasi yang lebih interaktif, adaptif, dan termediasi oleh media digital. Komunikasi politik dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi sebagai mekanisme utama dalam negosiasi kekuasaan dan legitimasi politik di ruang publik digital yang dinamis.

Arus Informasi Global dan Fragmentasi Persepsi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus informasi global yang semakin intens melalui media digital berkontribusi langsung terhadap fragmentasi persepsi publik dalam menilai kebijakan dan partai politik di tingkat lokal. Globalisasi informasi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai sumber informasi politik dari beragam konteks geografis dan politik secara simultan. Kondisi ini menyebabkan publik tidak lagi mengandalkan satu sumber informasi resmi, melainkan membandingkan berbagai narasi yang beredar di ruang digital sebelum membentuk sikap politik. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Castells (2011) yang menegaskan bahwa komunikasi politik di era *network society* berlangsung dalam struktur jaringan yang terbuka dan terdesentralisasi.

Fragmentasi persepsi publik terjadi ketika informasi global yang bersifat lintas konteks bertemu dengan realitas lokal yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Informasi mengenai kebijakan atau praktik politik di daerah lain maupun

negara lain sering kali dijadikan tolok ukur oleh masyarakat dalam menilai aktor politik lokal. Namun, perbedaan konteks tersebut tidak selalu dipahami secara utuh, sehingga memunculkan interpretasi yang beragam dan terkadang kontradiktif. Couldry dan Hepp (2017) menyebut kondisi ini sebagai konsekuensi dari *deep mediatization*, di mana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membentuk kerangka persepsi publik terhadap realitas politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, ditemukan bahwa masyarakat lokal semakin kritis dan selektif dalam merespons informasi politik. Publik kerap membandingkan kebijakan pemerintah daerah dan sikap partai politik dengan informasi yang mereka peroleh dari media digital mengenai daerah lain maupun level nasional dan global. Perbandingan ini membentuk ekspektasi publik yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah dan partai politik, khususnya dalam hal transparansi, kecepatan respons, dan konsistensi komunikasi politik (Wawancara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik tidak lagi bersifat homogen, melainkan terfragmentasi sesuai dengan sumber informasi, platform digital, dan pengalaman sosial masing-masing individu. Bennett dan Pfetsch (2018) menyatakan bahwa fragmentasi ini merupakan ciri utama *disrupted public sphere*, di mana ruang publik tidak lagi terintegrasi dalam satu arena diskursif yang sama. Akibatnya, partai politik menghadapi kesulitan dalam membangun narasi politik yang diterima secara seragam oleh seluruh segmen publik.

Dalam konteks komunikasi politik Partai Golkar, fragmentasi persepsi publik ini menjadi tantangan strategis. Pesan politik yang disampaikan melalui satu kanal komunikasi dapat menghasilkan respons yang berbeda ketika beredar di platform digital lain. Hal ini menuntut partai politik untuk memahami bahwa komunikasi politik bukan lagi proses penyampaian pesan tunggal, melainkan proses adaptif yang melibatkan negosiasi makna dengan publik yang terfragmentasi. Davis (2018) menegaskan bahwa dalam sistem komunikasi yang termediasi, legitimasi politik bergantung pada kemampuan aktor politik membaca dinamika persepsi publik dan mengelola komunikasi secara reflektif.

Dengan demikian, arus informasi global tidak hanya memperluas akses publik terhadap informasi politik, tetapi juga menciptakan fragmentasi persepsi yang memengaruhi cara publik menilai kebijakan dan partai politik di tingkat lokal. Fragmentasi ini menegaskan bahwa komunikasi politik di era globalisasi informasi harus dipahami sebagai proses relasional dan dinamis, di mana makna dan legitimasi politik terus dinegosiasikan dalam ruang publik digital yang kompleks.

Pelemahan Peran Negara dalam Pengelolaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan adanya pelemahan peran negara dalam pengelolaan informasi publik seiring dengan meningkatnya arus informasi digital dan keterbukaan ruang publik. Globalisasi informasi menyebabkan negara tidak lagi memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan sirkulasi informasi politik secara hierarkis dan terpusat. Informasi publik kini diproduksi dan disebarkan oleh berbagai aktor non-negara melalui media digital, sehingga otoritas negara dalam menentukan agenda dan narasi politik menjadi semakin terbatas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Castells (2009) dan Davis (2010) yang menegaskan bahwa globalisasi komunikasi telah mengubah posisi negara dari pengendali utama informasi menjadi salah satu aktor dalam arena komunikasi yang terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, ditemukan bahwa pemerintah daerah tidak lagi dipahami sebagai pihak yang dapat mengontrol arus informasi publik secara penuh. Peran pemerintah lebih diarahkan pada upaya menjaga kredibilitas informasi, merespons isu secara cepat, dan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan. Upaya pengendalian informasi yang bersifat represif justru dipandang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik (Wawancara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa pelemahan peran negara tidak berarti hilangnya peran negara dalam komunikasi politik, melainkan perubahan fungsi negara dalam ruang publik digital. Negara dan partai politik dituntut untuk beradaptasi dengan logika komunikasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Bennett dan Pfetsch (2018) menyebut kondisi ini sebagai bagian dari *disrupted public sphere*, di mana otoritas institusional tidak lagi menjadi sumber utama legitimasi politik.

Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi instrumen penting bagi negara dan partai politik untuk mengelola legitimasi, bukan untuk mengendalikan informasi. Keberhasilan komunikasi politik tidak diukur dari sejauh mana negara mampu membatasi arus informasi, melainkan dari kemampuannya membangun relasi kepercayaan dengan publik dalam ruang komunikasi yang terbuka dan kompetitif.

Mediasi Kekuasaan dan Transformasi Legitimasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan politik dalam konteks komunikasi politik Partai Golkar semakin dipahami sebagai sesuatu yang bersifat relasional dan termediasi. Posisi formal dalam struktur pemerintahan dan partai politik masih memiliki arti penting, namun tidak lagi dianggap cukup untuk menjamin pengaruh politik yang berkelanjutan. Kekuasaan politik kini sangat bergantung pada bagaimana aktor politik direpresentasikan dan dipersepsikan dalam ruang publik digital. Temuan ini mengonfirmasi konsep *mediated power* yang dikemukakan oleh Davis (2018, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara, elite Partai Golkar menyadari bahwa legitimasi politik tidak lagi dapat dipertahankan hanya melalui jabatan formal atau struktur organisasi. Legitimasi harus terus dibangun melalui komunikasi politik yang konsisten, terbuka, dan responsif terhadap dinamika publik. Dalam konteks ini, media digital berperan sebagai mediator utama yang membentuk persepsi publik terhadap kekuasaan dan otoritas politik (Wawancara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, 2025).

Transformasi legitimasi politik ini menunjukkan pergeseran dari legitimasi yang bersifat struktural menuju legitimasi yang bersifat komunikatif. Couldry dan Hepp (2017) menjelaskan bahwa dalam kondisi *deep mediatization*, praktik politik tidak dapat dilepaskan dari logika media karena media telah menjadi bagian integral dari proses pembentukan realitas sosial dan politik. Dengan demikian, kegagalan dalam mengelola komunikasi politik berpotensi langsung berdampak pada erosi legitimasi politik.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik berfungsi sebagai mekanisme utama dalam produksi dan pemeliharaan kekuasaan politik. Komunikasi tidak lagi sekadar menjadi sarana penyampaian pesan, tetapi menjadi arena negosiasi makna antara aktor politik, media, dan publik. Kondisi ini menegaskan bahwa legitimasi politik di era globalisasi informasi bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan dalam ruang publik digital (Davis, 2018).

Dengan demikian, mediasi kekuasaan dan transformasi legitimasi politik tidak dapat dipahami secara terpisah dari dinamika globalisasi informasi dan pelemahan peran negara. Kekuasaan politik dalam konteks komunikasi politik Partai Golkar merupakan

hasil dari proses relasional yang melibatkan struktur institusional, praktik komunikasi, dan persepsi publik yang termediasi oleh media digital.

Strategi Komunikasi Politik Hibrida Partai Golkar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Golkar mengembangkan strategi komunikasi politik yang bersifat hibrida sebagai respons terhadap dinamika globalisasi informasi dan fragmentasi ruang publik digital. Strategi komunikasi hibrida ini ditandai oleh pengombinasian antara kekuatan struktur organisasi partai yang mapan dengan adaptasi terhadap logika komunikasi media digital yang fleksibel, cepat, dan interaktif. Temuan ini sejalan dengan konsep *hybrid media system* yang dikemukakan oleh Chadwick (2017), di mana komunikasi politik berlangsung melalui interaksi simultan antara media lama dan media baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, strategi komunikasi digital tidak dipahami sebagai pengganti kerja politik konvensional, melainkan sebagai pelengkap yang memperluas jangkauan komunikasi partai. Struktur organisasi partai tetap menjadi modal penting dalam membangun basis dukungan, sementara media digital dimanfaatkan untuk merespons isu publik secara cepat dan menjaga visibilitas politik di ruang publik digital (Wawancara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, 2025).

Strategi komunikasi politik hibrida ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa komunikasi politik tidak lagi dapat dijalankan melalui satu kanal komunikasi yang seragam. Partai politik harus mampu menyesuaikan pesan dan gaya komunikasi dengan karakteristik platform digital serta segmentasi audiens yang berbeda. Bennett dan Pfetsch (2018) menegaskan bahwa dalam *disrupted public sphere*, aktor politik dituntut untuk mengelola komunikasi secara adaptif guna menjangkau publik yang terfragmentasi.

Dalam konteks mediasi kekuasaan, strategi komunikasi politik hibrida memungkinkan Partai Golkar mempertahankan stabilitas institusional sekaligus beradaptasi dengan tuntutan komunikasi digital. Davis (2018) menekankan bahwa dalam sistem komunikasi yang termediasi, kekuasaan politik bergantung pada kemampuan aktor politik mengelola visibilitas dan persepsi publik. Dengan demikian, strategi komunikasi hibrida menjadi bentuk adaptasi institusional yang penting bagi partai politik mapan dalam menjaga legitimasi politik di era globalisasi informasi.

Negosiasi Identitas Partai dalam Ruang Publik Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik Partai Golkar dalam ruang publik digital berfungsi sebagai arena negosiasi identitas partai. Identitas partai tidak lagi diproduksi secara sepihak melalui simbol dan narasi resmi, tetapi dinegosiasikan secara terus-menerus melalui interaksi dengan publik di media digital. Kondisi ini mencerminkan perubahan mendasar dalam cara identitas politik dibangun dan dipertahankan di era globalisasi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara, elite Partai Golkar menyadari adanya tekanan untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik media sosial yang cenderung populis dan personal. Namun, adaptasi tersebut tidak dimaknai sebagai pelepasan identitas institusional partai, melainkan sebagai proses representasi ulang nilai-nilai partai agar tetap relevan dengan konteks sosial yang berubah (Wawancara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, 2025).

Temuan ini sejalan dengan pandangan Couldry dan Hepp (2017) mengenai *deep mediatization*, di mana media telah menjadi bagian integral dari praktik sosial dan politik sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, identitas politik tidak bersifat statis, melainkan dibentuk melalui praktik komunikasi yang terus berlangsung dalam ruang publik digital. Komunikasi politik menjadi mekanisme utama dalam menjaga keberlanjutan identitas dan legitimasi politik partai.

Davis (2020) menegaskan bahwa dalam sistem komunikasi digital, kegagalan aktor politik dalam mengelola representasi diri dan identitas politik dapat berdampak langsung pada erosi legitimasi. Oleh karena itu, negosiasi identitas partai dalam ruang publik digital merupakan bagian dari proses mediasi kekuasaan, di mana makna politik dan otoritas simbolik terus diproduksi dan diuji melalui persepsi publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik hibrida dan negosiasi identitas partai merupakan dua proses yang saling berkaitan. Keduanya menjadi mekanisme adaptif Partai Golkar dalam menghadapi dinamika globalisasi informasi, fragmentasi ruang publik digital, serta transformasi sumber legitimasi politik. Komunikasi politik tidak lagi sekadar menjadi sarana penyampaian pesan, tetapi arena strategis dalam pengelolaan identitas, kekuasaan, dan legitimasi politik partai mapan.

Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati dalam membaca temuan dan implikasinya. Pertama, penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan fokus pada praktik komunikasi politik Partai Golkar di tingkat lokal, sehingga temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh partai politik atau konteks nasional. Fokus pada konteks lokal justru dipilih untuk memungkinkan pembacaan yang mendalam terhadap dinamika komunikasi politik dalam ruang publik digital yang spesifik dan kontekstual.

Kedua, data empiris penelitian ini terutama bersumber dari wawancara dengan elite Partai Golkar dan analisis dokumen, sehingga perspektif pemilih akar rumput dan interaksi horizontal antarwarga dalam ruang digital belum sepenuhnya terakomodasi. Ketiga, penelitian ini menitikberatkan pada analisis wacana dan praktik komunikasi politik, sehingga belum secara langsung mengukur dampak komunikasi politik terhadap perilaku elektoral atau preferensi politik publik. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pendekatan komparatif, melibatkan aktor politik yang lebih beragam, serta mengombinasikan analisis kualitatif dengan pendekatan kuantitatif atau *digital methods*.

Kebaruan/Kontribusi

Penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi penting dalam kajian komunikasi politik, khususnya dalam konteks partai politik mapan di Indonesia. *Pertama*, penelitian ini menawarkan pendekatan teoretis berbasis konsep mediasi kekuasaan Aeron Davis untuk membaca praktik komunikasi politik Partai Golkar. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan komunikasi politik Golkar dalam kerangka strategi elektoral atau kampanye politik, artikel ini memosisikan komunikasi politik sebagai arena produksi dan negosiasi kekuasaan dalam sistem komunikasi yang termediasi. *Kedua*, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa pelemahan peran negara dan partai politik dalam pengendalian narasi publik tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga secara nyata dialami di tingkat lokal. Temuan ini memperluas relevansi teori komunikasi politik global ke dalam konteks

politik lokal Indonesia. *Ketiga*, penelitian ini memperkenalkan konsep strategi komunikasi politik hibrida sebagai bentuk adaptasi institusional partai mapan dalam menghadapi globalisasi informasi. Konsep ini menunjukkan bahwa adaptasi komunikasi tidak selalu berarti pelepasan identitas institusional, melainkan proses negosiasi antara stabilitas organisasi dan fleksibilitas komunikasi digital. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi dalam memperkaya kajian komunikasi politik dengan perspektif struktural dan reflektif mengenai transformasi kekuasaan, legitimasi, dan peran partai politik mapan di era globalisasi informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi informasi telah mengubah secara mendasar praktik komunikasi politik Partai Golkar sebagai partai politik mapan. Komunikasi politik tidak lagi berlangsung dalam ruang yang terpusat dan hierarkis, melainkan dalam ruang publik digital yang terfragmentasi dan termediasi oleh media. Dalam konteks ini, negara dan partai politik mengalami penurunan kapasitas dalam mengendalikan narasi publik secara institusional.

Hasil penelitian menegaskan bahwa komunikasi politik Partai Golkar berlangsung sebagai proses negosiasi makna yang bersifat relasional dan dinamis. Kekuasaan politik tidak sepenuhnya bersumber dari posisi formal dan struktur organisasi, tetapi semakin bergantung pada visibilitas media dan kepercayaan publik. Temuan ini mengonfirmasi relevansi konsep mediasi kekuasaan dalam memahami transformasi legitimasi politik di era globalisasi informasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Partai Golkar mengembangkan strategi komunikasi politik hibrida dengan mengombinasikan kekuatan struktur organisasi dan adaptasi terhadap logika komunikasi digital. Strategi ini memungkinkan partai mempertahankan identitas institusional sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika ruang publik digital. Dengan demikian, komunikasi politik partai mapan di era globalisasi informasi tidak dapat dipahami sebagai upaya pengendalian narasi, melainkan sebagai proses berkelanjutan dalam mengelola legitimasi politik.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi partai politik, diperlukan penguatan strategi komunikasi politik yang berorientasi pada dialog dan kepercayaan publik, bukan sekadar penyampaian pesan satu arah.
2. Bagi negara dan pembuat kebijakan, penting untuk memposisikan diri sebagai pengelola kualitas komunikasi publik yang transparan dan akuntabel, bukan sebagai pengendali informasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji praktik komunikasi politik partai mapan dengan pendekatan komparatif lintas partai atau lintas daerah guna memperluas generalisasi analitis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan dari Partai Golkar di tingkat lokal yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga bagi

penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat dan pihak-pihak yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Achmad Muchlis berkontribusi dalam perumusan masalah penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penulisan naskah artikel.

Andi Faisal Bakti berkontribusi dalam pengembangan kerangka teoretis, penajaman analisis konseptual, serta penelaahan dan penyuntingan akhir naskah.

Seluruh penulis menyetujui versi akhir artikel ini untuk dipublikasikan.

REFERENSI

- Alshodiq, M. (2020). *Himpunan peraturan sistem perbukuan dan hak cipta di Indonesia: Dilengkapi peraturan tentang pemberian ISBN dan akreditasi penerbitan ilmiah*. Branda Media Nusantara.
- Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018). Rethinking political communication in a time of disrupted public spheres. *Journal of Communication*, 68(2), 243–253. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx017>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2011). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Davis, A. (2010). *Political communication and social theory*. Routledge.
- Davis, A. (2018). *Political communication: A new introduction for crisis times*. Polity Press.
- Davis, A. (2020). Media, power and politics in the digital age. *European Journal of Communication*, 35(4), 325–339. <https://doi.org/10.1177/0267323120922061>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing media systems: Three models of media and politics*. Cambridge University Press.
- Hamdi. (2023). Kebijakan pengelolaan program bantuan operasional sekolah (BOS) dalam peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(2), 309–332. <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i2.75>

- Heny, H., & Pamungkas, B. (2016). Implementasi model hybrid learning pada proses pembelajaran mata kuliah Statistika II di Prodi Manajemen FPEB UPI. *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM UPI*, 3(1), 182–195.
- Hidayat, D., & Ishak, A. (2019). Komunikasi politik partai politik di era media digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 101–115.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab–Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.